

BAB IV

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA IAIN WALISONGO SEMARANG

A. Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang

Apabila memperhatikan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk wawancara dengan sejumlah Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, bahwa pada intinya banyak mahasiswa yang berminat berwirausaha. Mahasiswa menyadari sulit mencari pekerjaan apalagi jika ingin menjadi PNS, bukan kesempatan yang mudah. Mahasiswa menyadari juga bahwa di era modern ini persaingan kerja makin besar, jumlah orang yang ingin bekerja pun sangat banyak. Jika terlalu memilih bidang usaha dengan hanya mengandalkan ijazah sangat mustahil berhasil. Untuk menjadi PNS saja melalui prosedur dan persyaratan yang tidak mudah. Jangankan jadi PNS, untuk dapat diterima bekerja di suatu perusahaan pun sudah semakin sulit.

Menyadari kondisi yang demikian, banyak mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang ingin berwirausaha. Faktor-faktor yang mendorong mahasiswa berwirausaha di antaranya:

1. Persaingan kerja yang makin kompetitif
2. Pengangguran yang makin meningkat. Tiap tahun, lembaga pendidikan mengeluarkan ribuan jumlah sarjana, sementara daya tampung tenaga kerja tidak sebanyak jumlah orang-orang yang ingin bekerja
3. Berwirausaha mendorong orang untuk terus kreatif dan inovatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, di antaranya

1. Ingin mandiri dan tidak mau ketergantungan pada suatu perusahaan, juga tidak mau ketergantungan dengan isu menjadi pegawai negeri
2. Berwirausaha itu memiliki kebebasan, tidak terikat pada seseorang, dan memacu diri untuk selalu maju.
3. Berwirausaha itu bisa meningkatkan keterampilan dan keberanian meningkatkan sumber daya insani.

Meskipun demikian di sisi lain ada hambatan yang menyebabkan mahasiswa IAIN Walisongo Semarang berwirausaha. Hambatan tersebut di antaranya:

1. Kesulitan untuk memperoleh modal. Banyak di antara mahasiswa berasal dari keluarga miskin, relasi yang kurang, dan kemampuan yang terbatas
2. Kesulitan lainnya adalah mencari lokasi yang strategis. Banyak lokasi strategis yang dikuasai orang-orang yang bermodal, demikian pula tidak sedikit lokasi strategis dikuasai turunan Tionghoa.
3. Kesulitan lainnya adalah belum maksimalnya tenaga pembimbing yang dapat mengarahkan mereka untuk menjadi wirausaha.

Menurut penulis, pada kondisi sekarang ini dapat dikatakan bahwa kunci kemakmuran adalah wirausaha, dan wirausaha adalah sebuah profesi yang sangat menjanjikan bagi kebaikan dalam kualitas hidup dengan meningkatkan daya beli. Daya beli tercipta dengan tingginya pendapatan yang diperoleh sebagai akibat dari profesi yang ditekuni.

Pada saat ini, Singapura yang miskin sumber daya alam, tetapi memperoleh pendapatan per kapita sebesar US\$ 37.000 pertahun, sedangkan Indonesia hanya memiliki sekitar US\$ 2.200 pertahun. Angka ini memberikan pesan dan kesan bahwa wirausaha sebuah profesi mulia yang perannya untuk membangun masyarakat dan negara yang makmur sangat jelas dan besar, khususnya bila kita mengkaji kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negara-negara maju lainnya di dunia baik itu di Eropa, Amerika, Australia dan Asia. Karena negara-negara tersebut, khususnya pemerintah dan rakyat telah memilih wirausaha sebagai profesi utama yang sangat penting dan ditumbuhkembangkan secara sengaja (*intentionally*). Saat ini 7% dari penduduk Singapura adalah wirausaha, Amerika Serikat 11 % dan Indonesia hanya 0.18%.¹

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yaitu setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar tersebut, tidak diimbangi dengan jumlah wirausahawan. Menteri Koperasi dan UKM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Syarifuddin Hasan saat berkunjung di Sulawesi Barat, menyampaikan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 238 juta jiwa, sedangkan jumlah wirausahawan hanya mencapai 0,24% saja dari jumlah penduduk tersebut. Jika kita bandingkan dengan jumlah wirausahawan Amerika Serikat mencapai sekitar 11% dari jumlah penduduknya. Jumlah wirausahawan di Singapura mencapai 7%, dan Malaysia mencapai 5%. Maka dapat dipastikan bahwa untuk

¹ Z. Heflin Frinces, *Be An Entrepreneur (Jadilah Seorang Wirausaha)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. vi-vii.

memperkuat perekonomian nasional Indonesia masih diperlukan munculnya para wirausahawan muda.²

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Selama periode Maret 2011–September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,95 juta orang pada September 2011), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,04 juta orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011).³

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 9,23 persen, menurun sedikit menjadi 9,09 persen pada September 2011. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2011 sebesar 15,72 persen, juga menurun sedikit menjadi 15,59 persen pada September 2011. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2011, sumbangan garis

² R.W. Suparyanto, *Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. vi.

³ [Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012 \(http://www.google.co.id/ab&q=kemiskinan+di+indonesia+2012&oq=kmiskinan\)](http://www.google.co.id/ab&q=kemiskinan+di+indonesia+2012&oq=kmiskinan), diakses tanggal 4 April 2013.

kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,53 persen, tidak jauh berbeda dengan Maret 2011 yang sebesar 73,52 persen.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, listrik, angkutan, dan pendidikan. Pada periode Maret 2011–September 2011, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.⁴

Dampak kemiskinan di Indonesia memunculkan berbagai penyakit pada kelompok risiko tinggi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan lanjut usia. Sejak krisis ekonomi tahun 1997 jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia menyebabkan cakupan gizi rendah, pemeliharaan kesehatan kurang, lingkungan buruk, dan biaya untuk berobat tidak ada.⁵

Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. *Pertama*, pengangguran. Sebagaimana diketahui jumlah pengangguran terbuka awal tahun 2011 ini saja, sebanyak 8,12 juta orang. Jumlah yang cukup “fantastis,” mengingat krisis multidimensional yang sedang

⁴[Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012 \(http://www.google.co.id/ab&q=kemiskinan+di+indonesia+2012&oq=kemiskinan\)](http://www.google.co.id/ab&q=kemiskinan+di+indonesia+2012&oq=kemiskinan), diakses tanggal 4 April 2013.

⁵<http://anindyaditakhoirina.wordpress.com/2011/04/11/kemiskinan-di-indonesia/>, diakses tanggal 4 April 2013

dihadapi bangsa saat ini. Dengan banyaknya pengangguran, berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi dan tingkat pengeluaran rata-rata.⁶

Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri atau menipu (dengan cara mengintimidasi orang lain) di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak. *Ketiga*, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan. Bagaimana seorang penarik becak misalnya, yang

⁶<http://sosbud.kompasiana.com/2011/09/01/indonesia-dan-potret-kemiskinan/> diakses tanggal 4 April 2013

memiliki anak cerdas bisa mengangkat dirinya dari kemiskinan, ketika biaya untuk sekolah saja sudah sangat mencekik leher? Sementara anak-anak orang yang berduit bisa bersekolah di perguruan-perguruan tinggi mentereng dengan fasilitas lengkap. Jika ini yang terjadi, sesungguhnya negara sudah melakukan “pemiskinan struktural” terhadap rakyatnya.⁷

Keempat, kesehatan. Seperti diketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif/ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. *Kelima*, konflik sosial bernuansa SARA (istilah Orba). Tanpa bersikap munafik, konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang dialami. Akibat ketiadaan jaminan keadilan, keamanan, dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang objektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif. Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia, baik di perdesaan maupun perkotaan.⁸

Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa ada berbagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dibukanya kesempatan mudah berwirausaha/bekerja, jaminan sanak famili yang berkelapangan kepada

⁷ *Ibid*

⁸ <http://sosbud.kompasiana.com/2011/09/01/indonesia-dan-potret-kemiskinan/> diakses tanggal 4 April 2013

anggota keluarga yang lain, zakat, baitul mal dengan segala sumbernya, berbagai kewajiban di luar zakat, sedekah sukarela dan kemurahan hati individu.⁹

Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk berupaya menyeimbangkan kesejahteraan antara dunia dan akherat. Hal ini seperti yang termuat pada QS Al-Qashash ayat 77, yaitu:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi”. (QS. Al-Qashas:77).

Manusia tidak diperkenankan untuk menyatakan “semua ini sudah takdir”. Pernyataan itu hanya patut diungkapkan jika didahului oleh usaha yang keras, hidup hemat, cermat dan hati-hati. Jika hal itu masih gagal juga mungkin itu sudah takdir.

Berbicara masalah takdir, jika tidak berpijak pada iman dan ilmu yang benar dapat mengakibatkan seseorang tergelincir ke dalam akidah dan cara hidup yang fatal. Kekeliruan umum orang terhadap qada dan qadar atau pada takdir itu ialah segala nasib baik dan buruk seseorang, atau muslim/kafirnya manusia, telah ditetapkan secara pasti oleh Allah. Manusia adalah ibarat robot Allah. Maka segala kenyataan hidup haruslah diterima apa adanya dengan

⁹ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1995).

sabar.¹⁰ Kekeliruan ini misalnya terdapat dalam pendirian kaum Jabariah, dimana menurutnya manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Jadi nama Jabariah berasal dari kata *jabara* yang mengandung arti memaksa. Memang dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam istilah Inggris paham ini disebut *fatalism* atau *predestination*. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan.¹¹ Menurut paham ini manusia tidak hanya bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalang, tapi manusia tidak mempunyai bagian sama sekali dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya.¹²

Sebaliknya kaum Qadariah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham Qadariah manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian nama Qadariah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar atau kadar Tuhan. Dalam istilah Inggrisnya paham ini dikenal dengan nama *free will* atau *free act*.¹³ Dengan demikian dalam paham tersebut bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui segala apa jua pun yang

¹⁰ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 2012, hlm. 214.

¹¹ Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia, 2007, hlm. 31. Bandingkan Muslim Ishaq, *Sejarah dan Perkembangan Teologi Islam*, Semarang: Duta Garafika, 2006, hlm. 55.

¹² M. Yusran Asmuni, *Ilmu Tauhid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 111.

¹³ Harun Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 55.

diperbuat oleh manusia dan tidak pula yang diperbuat oleh manusia itu dengan kudrat dan iradah Allah ta'ala. Bahkan manusialah yang mengetahui serta mewujudkan segala apa yang diamalkannya itu dan semuanya dengan kudrat iradat manusia sendiri. Tuhan sama sekali tidak campur tangan di dalam membuktikan amalan-amalan itu.¹⁴

Disisi lain aliran Maturudiah mengetengahkan suatu teori, manusia diberi Allah *kudrah* dan *masyi'ah* (kekuatan dan kehendak). Jadi manusia setelah diberi potensi tersebut, ia bisa melakukan sesuatu. Paham inilah yang selanjutnya dikenal dengan paham ikhtiar. Manusia diberi kemampuan untuk berikhtiar atau berusaha. Paham ikhtiar inilah yang dipandang bisa menengahi dari kedua paham sebelumnya, yakni Jabariyah dan Qadariyah.¹⁵

Kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan sebagai masalah yang harus dilenyapkan.

B. Aktualisasinya Pengembangan wirausaha di Indonesia

Dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran sangat diperlukan tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan baru yang kreatif dan inovatif. Di samping itu, dengan berkembangnya wirausaha juga akan bertambah banyaknya pelaku-pelaku bisnis baru dan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun untuk pengembangan wirausaha tersebut dapat dilakukan dengan:

1. Melalui Perguruan Tinggi atau Universitas

¹⁴ H. M. Taib Tahir Abd Mu'in, *Ilmu Kalam*, Jakarta: Wijaya, 2006, hlm. 238.

¹⁵ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: Duta Grafika, dan Yayasan Studi Iqra, 2005, hlm.76.

Telah kita ketahui menurut data BPS tahun 2009, jumlah pengangguran tenaga terdidik tingkat sarjana sebanyak 701.651 orang. Hal ini disebabkan mereka tidak dibekali keterampilan atau keahlian serta sifat atau jiwa kewirausahaan. Para lulusan sarjana tersebut hanya menginginkan menjadi karyawan atau pegawai di perusahaan atau di kantor saja. Untuk mengatasi terjadinya pengangguran sarjana ini, satu-satunya jalan harus memberikan mata kuliah Kewirausahaan di setiap perguruan tinggi atau universitas.

Dalam hal ini, mahasiswa tidak hanya diberi teori-teori kewirausahaan, tetapi lebih ditekankan pada praktik-praktik kewirausahaan mengadakan peninjauan atau observasi serta diskusi dengan pimpinan perusahaan. Di samping itu, sebelum mereka lulus diwajibkan magang [kerja praktik] selama kurun waktu tertentu, misalnya 3 atau 6 bulan. Dengan demikian, para sarjana yang telah lulus dari perguruan tinggi, selain ingin menjadi karyawan pada perusahaan atau kantor-kantor pemerintahan, juga memiliki alternatif untuk menjadi seorang pengusaha (wirausaha).

Dengan diberikannya mata kuliah kewirausahaan di seluruh perguruan tinggi atau universitas, akan mendorong tumbuhnya pelaku-pelaku bisnis baru dan hal ini berarti akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi tingkat pengangguran.

2. Melalui Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai wakil dari pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong antusias untuk menjadi pelaku-pelaku bisnis (wirausaha), yaitu sebagai berikut:

- a. sosialisasi kewirausahaan bagi sarjana calon wirausaha, termasuk pemuda, siswa sekolah, dosen, dan guru;
- b. memotivasi atau mengubah mindset yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sukses;
- c. memperkenalkan kewirausahaan dengan cara pendidikan , dan latihan, peninjauan ke tempat usaha, dan praktik usaha membuat action plan;
- d. bimbingan dan pendampingan selama berusaha dan advokasi;
- e. inkubator (*in wall & out wall*);
- f. magang pada perusahaan besar dan kecil;

Jika hal tersebut di atas benar-benar dilakukan secara intensif di masyarakat, penulis mengharapkan di masyarakat akan banyak bermunculan pelaku-pelaku bisnis (wirausaha).

Apalagi jika semangat dan jiwa kewirausahaan sudah tertanam di hati masyarakat. Hal ini jelas lebih memperkuat dorongan masyarakat untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang mandiri.

3. Melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian juga memiliki peran dalam memberdayakan tenaga-tenaga usia kerja yang masih menganggur menjadi tenaga yang produktif. Menurut data BPS tahun 2009, penduduk usia kerja atau yang sering disebut angkatan kerja sebesar 113,83 juta orang. Untuk mengurangi jumlah

pengangguran, maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah sejak lama mendidik tenaga-tenaga kerja pada Balai Latihan Kerja yang banyak tersebar di berbagai daerah di seluruh tanah air. Balai Latihan Kerja tersebut memberikan berbagai keterampilan dan keahlian, seperti perbekalan menjahit, salon, computer, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Menurut pendapat penulis, kegiatan-kegiatan Balai Latihan kerja (BLK) tersebut harus terus dikembangkan, baik kuantitas maupun kualitasnya, agar kemiskinan dan pengangguran terus berkurang dan tujuan menyejahterakan seluruh masyarakat dapat segera tercapai.

Pemerintah sangat berperan dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di tanah air. Dari tahun ke tahun, pemerintah terus berusaha meningkatkan pembangunan di segala bidang. Hal ini tercermin dalam meningkatnya pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara. Pada tahun 2005, pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan sebesar Rp400 triliun dan pada tahun 2009 pembiayaan pembangunan meningkat menjadi Rp1000,8 triliun. Adapun perkiraan besarnya pembiayaan pembangunan pada tahun 2010 dan tahun 2011 juga terus meningkat, masing-masing menjadi Rp1047 triliun dan Rp127 triliun.

Namun dalam kenyataannya, dari kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut belum dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Meskipun APBN yang dikeluarkan terus meningkat, namun

hasilnya masih jauh dari memuaskan. Hal ini tercermin pada data BPS tahun 2009 bahwa kondisi ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	231,43	Juta
Angkatan Kerja	113,83	Juta
Penduduk yang Bekerja	104,87	Juta
Pengangguran	8,96	Juta
Pengangguran Sarjana	701,654	Juta
Penduduk Miskin	32	Juta
Pendapatan per Kapita	US\$ 2600	Juta

Pengentasan pengangguran dan kemiskinan pada dasarnya tidak dapat diselenggarakan hanya oleh pemerintah saja, tetapi perlu partisipasi dari seluruh masyarakat. Kegiatan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan telah banyak dilakukan melalui Kementerian yang terkait, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang dana pembiayaannya juga berasal dari pemerintah, pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain sebagainya. Penulis mengharapkan jika kebijakan dari program tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan benar serta ada pendampingan manajemen dan pengawasan untuk setiap kegiatan usaha atau proyek, pasti pengangguran dan kemiskinan akan terus berkurang dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Masalah pengangguran mutlak harus diutamakan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran dana pembiayaan di tengah jalan sehingga dana yang telah dikururkan pemerintah

lewat APBN, benar-benar sampai pada tujuannya dan penegakan hukum harus terus dilakukan.

Selain dari itu perlu kerjasama perusahaan besar dengan lingkungan dan usaha kecil dan menengah. Yang dimaksud kerja sama perusahaan besar dengan lingkungan adalah keberadaan perusahaan di daerah tersebut berkewajiban meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut. Misalnya petani di Kalimantan Timur memerlukan bengkel las untuk memperbaiki alat-alat pertanian yang rusak serta memerlukan perahu untuk penyeberangan [ketinting) yang dirasakan sangat penting untuk kelancaran transportasi. Melalui kelompok tani dan pemerintah desa, misalnya mereka membuat proposal kebutuhan yang diinginkan untuk diajukan kepada perusahaan batu bara. Maka perusahaan akan mengkaji usulan proposal tersebut untuk disetujui dan perusahaan bekerja sama dengan perbankan setempat untuk memberikan pinjaman lunak sejumlah dana yang diperlukan oleh perusahaan dengan bunga rendah, misalnya 5% per tahun. Di samping itu, perusahaan juga akan mendidik pemuda-pemuda setempat untuk menjadi tenaga-tenaga ahli mengelas. Jadi, bengkel las tersebut tidak hanya melayani perbaikan alat-alat pertanian saja, tetapi juga menerima permintaan dari masyarakat. Sedang perahu kesinting tersebut digunakan sebagai transportasi masyarakat dengan tarif tertentu. Dengan jalan tersebut dapat dikembalikan tepat waktu, produksi pertanian meningkat, dan pendapatan masyarakat setempat juga meningkat. Kelompok tani dari perangkat desa tersebut ditugasi untuk mengawasi proyek dan mendapat imbalan yang besarnya ditentukan oleh perusahaan batu bara

tersebut. Pengembalian dana pinjaman yang diterima dari proyek-proyek binaan tersebut, akan digunakan untuk proyek-proyek lainnya dan karena proyek tersebut dikelola dengan profesional maka akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Hal ini menambah simpati masyarakat terhadap keberadaan perusahaan batu bara serta pada akhirnya masyarakat turut menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Kerja sama perusahaan besar dengan pengusaha kecil dan menengah khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu dengan menyisihkan keuntungan sebesar 0-6% yang dipinjamkan kepada usaha kecil menengah dan koperasi. Di samping memberikan pinjaman dana kepada usaha kecil menengah dan koperasi, perusahaan BUMN tersebut juga memberikan bimbingan pengarahannya, pembinaan, dan pendampingan manajemen. Pengembalian dana dari UKM dan Koperasi tersebut juga akan digulirkan kepada UKM dan koperasi lainnya yang perlu dibina. Sebenarnya, bentuk kerja sama antara UKM, Koperasi, dan BUMN atau perusahaan besar lainnya tidak terbatas pada permodalan saja, tetapi juga kerja sama lainnya, misalnya UKM sebagai subkontraktor atau supplier bahan baku, dan lain sebagainya.

Gambaran kegiatan tersebut merupakan sebagian kecil yang telah dilakukan pemerintah. Selain itu, masih banyak kegiatan lain yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Telah dijelaskan bahwa dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, partisipasi dari seluruh masyarakat

sangat diperlukan untuk terjun menjadi pengusaha-pengusaha baru (wirausaha) meskipun harus dimulai dari bawah.